

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan-pemaparan yang penulis temukan dari masyarakat dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat kota Yogyakarta terhadap sabda raja Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam konflik internal keraton terbagi menjadi tiga bagian dalam penelitian yang penulis sampaikan, yang pertama adalah persepsi masyarakat pro terhadap sabda raja, kedua adalah persepsi masyarakat kontra sabda raja, dan ketiga adalah masyarakat netral sabda raja. Dari tiga bagian masyarakat yang penulis golongankan, sebenarnya penulis sudah mempunyai pemahaman dengan munculnya polemik sabda raja antara masyarakat pro, masyarakat kontrak dan masyarakat netral.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai persepsi masyarakat kota Yogyakarta terhadap sabda raja Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam konflik internal keraton, penulis dapat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyebutan Buwono diubah menjadi Bawono bukan persoalan banar, salah, baik, buruk atau jelek tapi suatu kepantasan dalam ilmu pemerintahan.
2. Penggunaan gelar Khalifatullah. Seyogyanya di pegang oleh seorang laki-laki, kendati Sri Sultan Hamengku Buwono ke X tidak memiliki

anak laki-laki oleh karena itu perlu dipertimbangkan oleh keluarga Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

3. Menyempurnakan keris Kanjeng Kyai Ageng Kopek dengan Kanjeng Kyai Ageng Joko Piturun. Diduga akan melahirkan kritik dari para ulama karena bernuansa mistik yang didalam Islam sangat dilarang.

Seiring dengan berjalannya waktu penulis memandang mengenai persepsi masyarakat Yogyakarta terhadap munculnya sabda raja, akan terus menjadi polemik di kalangan masyarakat yang berada di Yogyakarta. Adapun yang penulis temukan aksi penolakan dari kalangan masyarakat terhadap sabda raja yang dikeluarkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X. Dapat dilihat dari persoalan munculnya sabda raja dan kondisi internal keraton yang memanas, yaitu pengangkatan GKR. Pembayaran menjadi Puteri Mahkota Kerajaan Keraton Yogyakarta yang akan menimbulkan polemik di kalangan masyarakat yang di mandatkan menjadi penerus Takhta Sri Sultan Hamengku Buwono yang selanjutnya.

Dalam persepsi terhadap polemik sabda raja ini, dapat penulis simpulkan bahwa terdapat 3 kalangan masyarakat yaitu masyarakat Pro, Kontra dan Netral terhadap munculnya sabda raja Sri Sultan Hamengku Buwono X. Masyarakat Pro mendukung dengan munculnya sabda raja yang memandatkan GKR. Pembayaran menjadi Puteri Mahkota. Sedangkan masyarakat Kontra dengan sepenuh hati mereka sangat menolak keras sabda raja yang di keluarkan Sri Sultan Hamengku Buwono X. Dan masyarakat Netral menerima keputusan yang di buat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X, asalkan aturan yang dibuat tidak bertentangan dengan kesejahteraan masyarakat.

## **B. Saran**

Penelitian ini dapat penulis sarankan dari berbagai polemik yang muncul dalam kalangan masyarakat kota Yogyakarta adalah :

1. Masyarakat pro, kontra dan netral tidak boleh terprovokasi dengan munculnya sabda raja yang dikeluarkan Sri Sultan Hamengku Buwono X agar tidak terjadi konflik antar masyarakat kota Yogyakarta.
2. Masyarakat harus patuhi aturan yang sudah dibuat oleh Sri Sultan, asalkan aturan yang dibuat tidak bertentangan dengan kesejahteraan masyarakat.
3. Sri Sultan Hamengku Buwono X seharusnya konsisten dengan aturan yang sudah dibuatnya agar masyarakat tidak memiliki polemik yang berkepanjangan.

Dalam hal ini walaupun keputusan yang secara mutlak di tentukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai raja Kerato Ngayogyakarta Hadinigrat, seharusnya masyarakat perlu mengetahuinya karena ini masalah kesejahteraan masyarakat bersama. Perihal pemilihan dan pengangkatan GKR. Pembayun sebagai Puteri Mahkota, masyarakat tidak perlu mengikut campur urusan internal Keraton. Akan tetapi sebagai masyarakat perlu mengetahuinya walaupun masyarakat tidak berhak untuk memutuskan keputusan apa yang sudah di putuskan oleh raja Keraton.